



## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai urusan wajib pemerintahan dengan memperhatikan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya melakukan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan yang salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Ada 6 (enam) urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, adapun penjelasan lebih detil di bawah akan disampaikan berdasarkan jenis pelayanan, target dan realisasi SPM, alokasi anggaran, dukungan personil, dan permasalahan serta solusi.

#### A. Urusan Pendidikan

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan di tingkat provinsi terdiri atas:

- a. Pendidikan menengah; dan
- b. Pendidikan khusus.

##### 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target capaian SPM pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 untuk jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK adalah 89.440 siswa, sedangkan jumlah penduduk usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB adalah 1.730 siswa.

### 3. Realisasi

Tabel 4.1

**Realisasi Capaian Target SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Persentase %
1	PENDIDIKAN MENENGAH	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	82.697	100 %
2	PENDIDIKAN KHUSUS	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN YANG TERMASUK DALAM PENDUDUK DISABILITAS YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	1.807	100
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	REALISASI	PERSENTASE %
1	PENDIDIKAN MENENGAH	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	76.119	85,43 %
2	PENDIDIKAN KHUSUS	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN YANG TERMASUK DALAM PENDUDUK DISABILITAS YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	1.351	74,76 %

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

## 2. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pendukung Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sebesar **Rp. 343.629.540.681** terdiri dari:

- a. APBD/DAK Provinsi Kepri Rp. 159.899.832.459
- b. BOS Rp. 183.729.708.222

## 1. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan penerapan SPM bidang pendidikan menengah dan khusus didukung oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari:

- a. Tenaga Pendidik pada Sekolah Menengah berjumlah 5.803 orang yang terdiri dari 1.872 PNS, 653 PPPK dan 3278 Non ASN;
- b. Tenaga Pendidik pada Sekolah Pendidikan Khusus sebanyak 236 orang, terdiri dari 50 orang PNS, 3 orang PPPK dan orang 184 Non PNS.

## 2. Hasil Capaian

Realisasi capaian SPM bidang pendidikan tahun 2022 yaitu sebesar 85.43 persen yang berarti bahwa dari 82.697 orang penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang berusia 16 s/d 18 tahun, sejumlah 76.119 orang yang mendapat layanan dasar Pendidikan Menengah.

Sedangkan untuk layanan dasar Pendidikan Khusus sebesar 74.76 persen, yang berarti bahwa dari 1.807 orang penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang membutuhkan khusus berusia 4 s/d 18 tahun, sejumlah 1.351 orang yang mendapat layanan dasar Pendidikan Khusus.

**Tabel 4.2**

**Hasil Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH ORANG TERLAYANI	CAPAIAN 2022	PAGU ANGGARAN SPM	REALISASI ANGGARAN SPM
1	PENDIDIKAN MENENGAH	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH	82.697	76.119	85.43%	330.185.097.651	318.886.421.594
2	PENDIDIKAN KHUSUS	JUMLAH WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN YANG TERMASUK DALAM PENDUDUK DISABILITAS YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KHUSUS	1.807	1.351	74.76 %	13.444.443.030	13.247.218.193

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

## 3. Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM

Bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:



- a. Kurangnya Sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data.
- b. Sulitnya menentukan kriteria penerima serta belum terjalinnya koordinasi yang baik dengan pihak terkait dengan data yang dibutuhkan.
- c. Keterbatasan anggaran serta masih adanya refocusing anggaran.
- d. Sistem Perencanaan dan penganggaran kegiatan/program belum murni berbasis SPM.

## B. Bidang Urusan Kesehatan

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi.

### 2. Target Pencapaian

Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Riau Bidang Kesehatan adalah 100%.

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Capaian Target SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	PERSENTASE %
1	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	8.349	100 %
2	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PROVINSI.	JUMLAH PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA PROVINSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	12.895	100 %
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	REALISASI	PERSENTASE %
1	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU	8.349	100 %



	BERPOTENSI BENCANA PROVINSI	BERPOTENSI BENCANA PROVINSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN		
2	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PROVINSI.	JUMLAH PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA PROVINSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	12.895	100 %

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau*

### 3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran 2022 di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagai berikut:

APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebesar **Rp. 80.940.668.237,-** (delapan puluh milyar Sembilan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Anggaran APBN untuk kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tidak ada.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
1.	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI	RP. 128.629.000,-	RP. 123.249.194,-	96%
2.	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PROVINSI	RP. 405.118.419,-	RP. 3.881.553.474,-	96%

### 4. Dukungan Personil

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 4.4**  
**Dukungan Personil**

NO	SDM KESEHATAN	JUMLAH SDM TERSEDIA
1	2	3
I.	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	
1	DOKTER	156
2	PERAWAT	264
3	BIDAN	134
4	TENAGA KESMAS	-
5	TENAGA KESWAN	27
6	TENAGA PENYULUH	25
II.	PENANGGULANGAN KLB	-
A	DILUAR FASILITAS YANKES TGC PROVINSI OLEH TGC	-
1	DOKTER	156
2	TENAGA KESMAS EPID	80
3	TENAGA KESMAS KESLING	330
4	TENAGA KESMAS ENTOMOLOGI	17
5	TENAGA LABORATORIUM	423
6	TENAGA PENYULUH	168
B	DI FASYANKES	-
1	DOKTER	1272
2	PERAWAT	3119
3	PETUGAS RADIOLOGI	168
4	PETUGAS LABORATORIUM	423

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

## 6. Hasil Capaian

Hasil Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR TAHUN 2022			PENDANAAN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA PROVINSI	8.349	8.349	100	128.629.000	123.249.194	96%



2	PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA PROVINSI	12.895	12.895	100	4.051.118.41 9	3.881.533.4 74	96%
---	---	--------	--------	-----	-------------------	-------------------	-----

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

## 7. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut :

- 1) Masih adanya masyarakat yang tertutup dan tidak melaporkan segera atas penyakit yang berpeluang menjadi KLB ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga penanganan terlambat dilakukan.
- 2) Anggaran yang tersedia untuk penanganan KLB lebih berfokus kepada penanganan COVID-19 padahal masih terdapat 24 jenis penyakit berpeluang KLB lainnya yang masuk dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang harus didukung anggaran penanggulangan.
- 3) Dengan adanya dampak pada kinerja daerah dan sumber anggaran penanganan KLB, menyebabkan Kepala Daerah cukup sulit untuk menetapkan suatu kasus penyakit tertentu naik menjadi status KLB.
- 4) Terlambatnya penerimaan data akibat keterlambatan pengiriman hasil sampel terduga KLB yang dikirim BKPK Kementerian Kesehatan RI.

## C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

### 1. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan minimal yang menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencakup :

- 1) Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

### 2. Target pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum



Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri yang daerah pelayanannya mencakup Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dan didukung dengan pembangunan infrastrukturnya oleh pemerintah provinsi kepulauan riau dalam bentuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Dalam hal Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, sampai saat ini belum teridentifikasi kebutuhan terkait pengelolaan air limbah domestik secara regional. Pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang hingga saat ini dilakukan secara individu dan komunal setempat yang kemudian dikelola dan dilakukan pengawasannya oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Sehingga belum teridentifikasi kebutuhan terhadap Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Tabel 4.6

#### Realisasi Capaian Target SPM Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	PERSENTASE %
1	PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA.	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	249.899 JIWA	100 %
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA.	JUMLAH RUMAH YANG DILAYANI OLEH SPALD REGIONAL PROVINSI DALAM SATU KELURAHAN/ DESA	0	0 %
NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	REALISASI	PERSENTASE %
1	PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA.	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	133.285	53,34 %
2	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA.	JUMLAH RUMAH YANG DILAYANI OLEH SPALD REGIONAL PROVINSI DALAM SATU KELURAHAN/ DESA	0	0 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau





### 3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pendukung pelayanan dasar Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota bersumber dari APBD Tahun 2022 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebesar **Rp.2.358.021.410,00**, namun dikarenakan ada beberapa paket pekerjaan yang terkena rasionalisasi pada saat penyesuaian anggaran di APBD-P, sehingga total anggaran di APBD-P menjadi **Rp.1.349.004.472,00** dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.7**

#### **Realisasi Pekerjaan Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022**

<b>NO.</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>NILAI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL PULAU BINTAN	RP. 776.666.993,00	SUDAH DILAKSANAKAN 100%
2.	PERENCANAAN OPTIMALISASI JARINGAN PERPIPAAN SPAM SWRO TANJUNGPINANG (PELABUHAN- GUDANG MINYAK)	RP. 139.258.380,00	SUDAH DILAKSANAKAN 100%
3.	OPTIMALISASI JARINGAN PERPIPAAN SPAM SWRO TANJUNGPINANG (PELABUHAN- GUDANG MINYAK)	RP. 1.295.598.581,00	SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN ANGGARAN PADA APBD-P, MAKA DILAKUKAN RASIONALISASI TERHADAP KEGIATAN TERSEBUT.
4.	PENGAWASAN OPTIMALISASI JARINGAN PERPIPAAN SPAM SWRO TANJUNGPINANG (PELABUHAN- GUDANG MINYAK)	RP. 93,500,000,00	SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN ANGGARAN PADA APBD-P, MAKA DILAKUKAN RASIONALISASI TERHADAP KEGIATAN TERSEBUT.

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau*



#### 4. Dukungan Personil

Jumlah pegawai Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Jumlah PNS sebanyak 7 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut:

a) S2 : 1 orang

b) S1 : 6 orang

B. Jumlah PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 4 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut:

a) S1 : 4 orang

#### 5. Hasil Capaian

**Tabel 4.8**

**Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022.**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	REALISASI
1.	PEMEMUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KABUPATEN/KOTA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA	133.285 JIWA
2.	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH YANG DILAYANI OLEH SPALD REGIONAL PROVINSI DALAM SATU KELURAHAN/ DESA	0 %

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau*

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota pada tahun anggaran 2022 sebesar 53,34% dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah penduduk di Wilayah Pelayanan = 249.899 jiwa

Jumlah penduduk terlayani = 133.285 jiwa

Capaian =  $\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk di Wilayah Pelayanan}} \times 100\% = 53,34\%$

Dalam hal Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, sampai saat ini pengolahan air limbah domestik di kabupaten bintan dan kota tanjungpinang dilakukan



secara individu dan komunal setempat yang kemudian dikelola dan dilakukan pengawasannya oleh masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga di tingkat Provinsi belum ada realisasi terkait hal tersebut.

## **6. Permasalahan dan Solusi**

### **A. Permasalahan**

- a) Belum tersedianya data mutu layanan capaian SPAM air minum dari Tirta Kepri yang mengurangi nilai capaian SPM
- b) Belum konsistensinya prioritas anggaran terkait SPM (adanya refocusing anggaran untuk kegiatan SPM) yang berpengaruh terhadap capaian SPAM Air minum.
- c) Belum tersedianya pengumpulan data terkait penyediaan air minum dan sanitasi yang berupa data BNBA. Namun saat ini sedang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk menggunakan data DTKS sebagai data dasar.
- d) Pengumpulan data yang belum tersedia mengakibatkan langkah-langkah penerapan selanjutnya terkendala seperti perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, dan pelaksanaan.

### **B. Solusi**

- a) Perlunya menyediakan dokumen rencana induk sistem penyelenggaraan air minum sebagai bagian integrasi secara menyeluruh dalam pengelolaan dan penyediaan air minum.
- b) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah Kepri khususnya untuk Pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan.
- c) Intervensi terhadap perusahaan daerah Perumda Tirta Kepri baik dari sisi kebijakan anggaran maupun peningkatan mutu dan kualitas pelayanan.
- d) Perlunya koordinasi stakeholder terkait terutama Biro Pemerintahan sebagai leader dalam penyelenggaraan SPM di Daerah. Sehingga dalam menjalankan rencana aksi SPM lebih terarah dan efisien.

## **D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Permukiman**

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Dasar hukum serta jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik



Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Sesuai ketentuan tersebut, jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan rakyat terdiri atas:

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dengan target 100%.
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi dengan target 100%.

## 3. Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**

### **Dukungan Anggaran Bidang Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	
				APBD	APBN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	150.000.000	N/A
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	150.000.000	N/A

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan*

*Permukiman Provinsi Kepulauan Riau*



#### 4. Dukungan Personil

Untuk mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan pelayanan dasar ini maka dukungan personil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau disampaikan sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Dukungan Personil Bidang Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	DUKUNGAN PERSONIL	
				PNS	NON PNS
1	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	IDENTIFIKASI LAHAN-LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN	7	9
2	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA ATAU TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI	7	9

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

#### 5. Hasil Capaian

Sebelum tahun 2022 tidak ada Surat Keputusan Gubernur tentang Status Tanggap Darurat Bencana. Demikian juga dengan program-program strategis provinsi yang mengharuskan adanya relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi. Pada tahun 2022 dilakukan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi berupa:

- Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi.

Hasil capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.11

## Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET DAERAH 2022	REALISASI SPM 2022
1	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI	PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI	100	100
2	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI	100	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

## 6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

- Tidak adanya Surat Keputusan Gubernur tentang Status Tanggap Darurat Bencana sebagai dasar pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat.
- Tidak adanya Program Pemerintah yang mengharuskan dilakukannya Relokasi.
- Tidak tersedianya data Kawasan kumuh kewenangan Provinsi dengan status ilegal yang dapat dilakukan relokasi.

Solusi yang dilakukan terkait kendala dan permasalahan tersebut antara lain:

- Melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau terkait kejadian bencana di Kabupaten/Kota serta kemungkinan penetapan status tanggap darurat bencana oleh Gubernur.
- Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis yang terkait dengan program strategis daerah yang mengharuskan dilakukannya relokasi.
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait relokasi Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi dengan status kepemilikan ilegal.



## E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.

### 2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Riau Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah 100% sebagaimana table dibawah ini.

**Tabel 4.12**  
**Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Riau**  
**Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
	PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KETERANGAN
PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI.	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA DAN PERKADA DI PROVINSI	100%	SETIAP TAHUN	JUMLAH BARANG, JASA DAN SUMBER DAYA MANUSIA	100%	SETIAP TAHUN	INDIKATOR MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR BERUPA JUMLAH BARANG

*Sumber : Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau*



### 3. Hasil Capaian

Capaian kinerja indikator SPM bidang trantibum adalah 100%, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.13**  
**Capaian Kinerja Indikator SPM Bidang Trantibum**

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA / PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROVINSI	5	12	42 %	12	12	100 %	92 %	SEDANG

Sumber : Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran pada tahun 2022 adalah **Rp. 2.083.448.800.**

### 5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Satuan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Kepri Tahun 2022 sebanyak 160 orang dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 4.14**

**Dukungan Personil Satuan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran**

a. Berdasarkan Status Pegawai

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)
1	PNS	41
2	PTT	82
3	THL	37

Sumber : Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau





b. Berdasarkan Latar belakang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	PNS	PTT	THL
1	PASCA SARJANA			
2	SARJANA (S1/D4)	7	22	1
3	DIPLOMA (III/II/I)			
4	SLTA		60	29
5	SMP			6
6	SD			1

Sumber : Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

## 6. Permasalahan dan solusi

### a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal adalah:

1. Standar Sarana Prasarana Satpol PP belum terpenuhi dikarenakan minimnya anggaran.
2. Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP belum terpenuhi karena sedikitnya anggota Satpol PP yang sudah mengikuti diklat PPNS hanya berjumlah 2 (dua) orang.
3. Belum adanya kebijakan daerah terkait standar teknis pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
4. Pengumpulan data terkait jumlah dan identitas lengkap penerima layanan dasar masih terkendala.
5. Pengumpulan data terkait jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia masih terkendala.
6. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar belum sepenuhnya dipahami.

### b. Solusi

Solusi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan SPM adalah:

1. Melakukan pengintegrasian penerapan SPM pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja)
2. Menyusun peraturan gubernur terkait standar teknis pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat



3. Perlu guidance/pelatihan per urusan pada setiap tahapan penerapan SPM.

## **F. Bidang Urusan Sosial**

### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti skala Provinsi;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti skala provinsi;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti skala provinsi;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Dalam Panti skala provinsi;
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi .

### **2. Target Pencapaian SPM di Daerah**

Capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%. Target Pencapaian SPM bidang sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15

**TARGET CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022**

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET	REALISASI
	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		
1	PERSENTASE (%) PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100 %	2022	DINAS SOSIAL PROV.
2	PERSENTASE (%) ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100%	2022	DINAS SOSIAL PROV.
3	PERSENTASE (%) LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100%	2022	DINAS SOSIAL PROV.
4	PERSENTASE (%) GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI	100%	2022	DINAS SOSIAL PROV.
5	PERSENTASE (%) KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH PROVINSI	100%	2022	DINAS SOSIAL PROV.
6	JUMLAH PEKERJA SOSIAL/TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG DISEDIAKAN DI DALAM PANTI	6 ORANG	2022	DINAS SOSIAL PROV.
7	JUMLAH TENAGA KESEHATAN (DOKTER, PSIKIATER, PEKSOS MEDIS) YANG DISEDIAKAN DI DALAM PANTI	6 ORANG	2022	DINAS SOSIAL PROV.

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau*

### 3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- *Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti*

Indikator pelayanan dasar tersebut ialah Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 78 orang penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 78 orang populasi



penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti.

- *Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti*

Indikator pelayanan dasar tersebut ialah Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 715 orang Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 715 orang Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti

- *Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti*

Indikator pelayanan dasar tersebut ialah Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 140 orang Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 140 orang Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti.

- *Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (khususnya Gelandangan dan Pengemis) di dalam Panti*

Indikator pelayanan dasar tersebut ialah Persentase tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 11 orang tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti dari 11 orang Populasi Populasi tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang membutuhkan rehabilitasi sosial di dalam panti.

- *Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial*

Indikator pelayanan dasar tersebut ialah Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi, dengan capaian sebesar 100 % atau setara dengan 200 orang korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dari 200 orang Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang



mempunyai perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi.

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 adalah 100% dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.16**

**REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN		
		INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI SKALA PROVINSI	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	2022	100 %	100%	100%
		PERSENTASE (%) PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI				
2	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI SKALA PROVINSI	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	2022	100%	100%	100%
		PERSENTASE (%) ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI				
3	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI SKALA PROVINSI	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI	2022	100%	100%	100%
		PERSENTASE (%) LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI				
4	REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN PENGEMIS DI DALAM PANTI SKALA PROVINSI	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR GELANDANGAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	2022	100%	100%	100%
		PERSENTASE (%) GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI				



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN		
		INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
5	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DAERAH PROVINSI	2022	100%	100%	100%
		PERSENTASE (%) KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH PROVINSI				
6		JUMLAH PEKERJA SOSIAL/TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG DISEDIAKAN DI DALAM PANTI	2022	6 ORANG	6 ORANG	100%
7		JUMLAH TENAGA KESEHATAN (DOKTER, PSIKIATER, PEKSOS MEDIS) YANG DISEDIAKAN DI DALAM PANTI	2022	6 ORANG	6 ORANG	100%
<b>NILAI RATA-RATA CAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL PROVINSI KEPRI (%)</b>						<b>100%</b>

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.17**  
**ALOKASI ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022**

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (RP)
1	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	RP. 132.523.877
2	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	RP. 866.807.858
3	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI	RP. 133.181.088
4	REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	RP. 22.575.200



NO	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN (RP)
5	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI	RP. 791.532.990
<b>JUMLAH</b>		<b>RP. 1.946.621.013</b>

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau*

## 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

Jumlah pegawai pendukung penerapan SPM di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebanyak 18 orang dengan perincian:

- a) PNS/ CPNS : 14 orang
- b) PTT Provinsi : 4 orang

Jumlah tenaga PNS sebanyak 14 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut:

- a) S 2 : 3 orang
- b) S 1 : 9 orang
- c) SLTA : 2 orang

## 6. Permasalahan dan solusi

### a. Permasalahan

- 1) Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat tertangani;
- 2) Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
- 3) Tidak adanya Panti Sosial yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memberdayakan panti milik masyarakat yang kemudian difasilitasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Daerah, terkait dengan kewenangan provinsi untuk pelayanan dasar PPKS di dalam Panti, harus memiliki Panti Sosial.

### b. Solusi



- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas sektor serta lintas daerah dengan masalah penanganan PPKS;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 3) Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS;
- 4) Pengusulan pembangunan Panti Sosial milik pemerintah. Saat ini pentusulan tersebut masih dalam tahap proses.

## **G. Program dan Kegiatan**

### **Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan**

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan hingga tahun 2026. Untuk menjamin pelaksanaan SPM dapat dikawal dan berjalan dengan baik maka indikator SPM dituangkan dalam indikator program RPJMD 2021-2026, yang kemudian indikator-indikator tersebut dibagikan ke Organisasi Perangkat Daerah Pengampu sesuai kewenangannya adalah sebagai berikut:

#### **1. Bidang Urusan Pendidikan**

Program dan kegiatan pendukung jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah untuk meningkatkan Persentase Penduduk Usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan SMA/SMK:





**Tabel 4.18**  
**Program Kegiatan Bidang Pendidikan**

PROGRAM	KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	PAGU
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS</b>	<b>183.361.182.085</b>
	1 PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU	15.938.283.936
	2 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	10.484.136.200
	3 PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM BIOLOGI	1.969.636.600
	4 PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM FISIKA	5.606.991.600
	5 PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KIMIA	4.736.383.902
	6 PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER	1.436.882.600
	7 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	4.214.395.800
	8 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	1.058.914.600
	9 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	6.003.052.581
	10 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH	2.294.873.600
	11 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	2.235.626.600
	12 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	764.134.600
	13 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG LABORATORIUM BIOLOGI	217.800.000
	14 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG LABORATORIUM KIMIA	337.985.600
	15 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG LABORATORIUM KOMPUTER	247.350.600
	16 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG LABORATORIUM BAHASA	142.165.000
	17 REHABILITASI RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH	170.122.000
	18 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	8.378.816.700
	19 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	189.572.000
	20 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	8.035.871.200
	22 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS	6.231.533.929
	23 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK	267.610.000
	24 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	78.628.000
	25 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH ATAS	432.030.000
	26 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH ATAS	101.888.384.437
<b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN</b>	<b>146.544.872.066</b>	
1 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	29.680.550.255	
2 PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK SISWA	8.241.552.607	



	3	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM	1.366.900.000
	4	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	1.893.480.000
	5	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	3.774.462.414
	6	REHABILITASI RUANG PRAKTIK SISWA	769.287.000
	7	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	4.316.375.200
	8	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	130.177.700
	9	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	18.274.900.000
	10	PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	2.448.797.200
	11	PENYELENGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK	374.400.000
	12	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	310.894.905
	13	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	900.035.000
	14	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	74.063.059.785
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI		279.043.500
	1	PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS	279.043.500

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Program dan kegiatan Pendukung jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus untuk meningkatkan Persentase Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB:

**Tabel 4.20**

**Program dan kegiatan Pendukung jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<b>PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS</b>		12.927.525.830
	1	PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH	1.174.441.200
	2	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	370.621.400
	3	PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	219.924.600
	4	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	230.793.100



	5	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.454.642.000
	6	PEMBANGUNAN KANTIN SEKOLAH	324.253.650
	7	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	309.796.200
	8	PENGADAAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	579.798.200
	9	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK	128.497.800
	10	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	356.493.680
	11	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	7.778.264.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<b>PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PROVINSI</b>		516.917.200
	1	PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS	516.917.200

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

## 2. Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.21**

### Program Kegiatan Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	1 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	PERSEN
			2 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN	PERSEN



				LUAR BIASA (KLB)	
			3	PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	PERSEN

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

### 3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22

#### Program Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI FISIK (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SPAM	902.033.927,00	886.689.529,00	100
2			PERBAIKAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN	204.695.620,00	183.070.210,00	100
3			PEMBINAAN TEKNIS SDM DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SPAM PROVINSI	97.468.800,00	63.159.000,00	100
4			PEMBINAAN TEKNIS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	144.806.125,00	92.095.756,00	100
TOTAL				1.349.004.472,00	1.222.648.942,00	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau



#### 4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.23**  
**Program Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP.)	REALISASI KEUANGAN (RP.)	REALISASI FISIK (%)
1	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH	IDENTIFIKASI LAHAN-LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN	150.000.000	149.445.861	100
2		KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI	IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA ATAU TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI	150.000.000	148.844.600	100

Sumber : Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau  
Provinsi Kepulauan Riau

#### 5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Jenis pelayanan dasar : pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi,
- Indicator pencapaian : Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi



**Tabel 4.24**  
**Program Kegiatan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU	REALISASI	%
1 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	KASUS	878.844.200	862.083.750	98.09
2 PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERBITAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	KASUS	264,517,300	263.681.300	99.68
3 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI	DOKUMEN	0	-	0.00%
4 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	DOKUMEN	89.413.572	88.748.070	99.26
5 PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA	ORANG	222.607.308	216.427.652	97.22
6 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN	DOKUMEN	0	-	0.00
7 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	UNIT	-	-	0.00
8 PENYUSUNAN SOP KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	DOKUMEN	33,793,570	29.080.200	86.05
9 PENYEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERKADA	LAPORAN	4.700.000	-	0.00
1 SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	LAPORAN	-	-	0.00
2 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	LAPORAN	264,517,300	264.297.300	99.92
3 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	LAPORAN	50.542.000	35.369.400	69.98
1 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS	LAPORAN	274.513.550	270.006.582	98.36
2 PEMBERKASAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN OLEH PPNS PENEGAK PERDA, DUKUNGAN PELAKSANAAN	DOKUMEN	-	-	-



SIDANG DITEMPAT, PENGUATAN SEKRETARIAT BERSAMA PPNS				
			2.083.448.800	2.029.694.254

Sumber : Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

## 6. Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.25**  
**Program Kegiatan Bidang Sosial**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU DANA (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI FISIK (%)
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	RP. 132.523.877	RP. 130.520.149	100
		REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES	RP. 290.641.556	RP. 278.261.270	100
			PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL SPRITUAL DAN SOSIAL	RP. 576.166.302	RP. 565.161.181	100
		REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	RP. 133.181.088	RP. 133.003.376	100
		REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI	PEMULANGAN KE DAERAH ASAL	RP. 22.575.200	RP. 22.543.200	100
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI	PENYEDIAAN PERMAKAMAN	RP. 338.013.000	RP. 337.214.650	100
			PENYEDIAAN SANDANG	RP. 178.505.390	RP. 177.882.490	100
			PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	RP. 275.014.600	RP. 270.111.200	100
<b>JUMLAH</b>				<b>RP.1.946.621.013</b>	<b>RP.1.914.697.516</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau